



DPR Rekomendasi Penyelamatan Merpati

Dahlan Anggap Tak Ada Solusi Tegas

JAKARTA—Harapan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) untuk kembali beroperasi tampaknya kembali kabur. Hal tersebut menyusul laporan panitia kerja (panja) Komisi VI DPR terkait penyelamatan Merpati, kemarin (7/7). Dalam laporan tersebut, dewan memberi sejumlah rekomendasi yang dinilai tidak memberikan solusi cocok. Rekomendasi pertama adalah permintaan agar Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap Merpati.

Kedua, permintaan BPK untuk melakukan audit investigasi dan pengusutan dalam pengadaan MA-60 oleh Merpati dari Xian Aircraft Industry. Keputusan tersebut disebabkan adanya sinyalir korupsi dalam proses pengadaan

tersebut. Ketiga, meminta Kementerian BUMN untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menekan kerugian Merpati dengan masa transisi satu tahun. Putusan tersebut dilengkapi dengan beberapa syarat. Antara lain, Merpati tidak melakukan spin off atau membentuk anak perusahaan sampai restrukturisasi hutang jangka panjang selesai; Merpati harus fokus pada bisnis penerbangan dengan potensi yield tinggi untuk rute-rute perintis; merevitalisasi alat-alat produksi dan mengoptimalkan semua aset-aset; dan meminta Kementerian Perhubungan dapat menerbitkan kembali AOC.

Keempat, meminta Kementerian BUMN merombak direksi Merpati dengan direksi baru. Kriteria yang dituntut dari direktur tersebut adalah tidak pernah terlibat dalam kasus moral hazard atau kasus KKN; Memahami

bisnis penerbangan sesuai dengan regulasi; dan memahami permasalahan yang ada di Merpati. Dengan begitu direktur baru tersebut bisa membuat konsep strategi bisnis yang realistis dan profitable untuk menghidupkan Merpati. Kelima, permintaan koordinasi antara Kementerian BUMN dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait skema penyelamatan Merpati.

Hasil yang ditunggu dari koordinasi tersebut adalah pola restrukturisasi utang jangka panjang Merpati dan penyelesaian terhadap hutang kepada karyawan. Rapat panja sempat memanas karena diwarnai aksi walk out dari tiga fraksi. Yakni, Fraksi PDIP; Fraksi PAN, dan Fraksi PPP. Menanggapi aksi tersebut, pimpinan rapat Erick Satria Wardhana mengaku bingung. Dia mengatakan sebenarnya panja sudah menghasilkan keputusan pada

2 Juli lalu. "Saya sedikit bingung, karena beberapa teman juga telah hadir dalam rapat yang berlangsung sebelumnya. Kalau dari yang fraksi PDIP, memang tidak hadir dirapat sebelumnya, jadi dia tidak mengerti permasalahannya. Dalam rapat-rapat sebelumnya juga sudah dibahas. Jadi, sebenarnya proses klarifikasi sudah semua," ungkapnya.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan rekomendasi tak memuaskan beberapa उसलannya. Menurutnya, hal yang dilaporkan tersebut sebenarnya upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. "Tiga hal yang saya kemukakan sebagai kunci penyelesaian merpati tidak secara tajam berada dalam kesimpulan panja ini. Jadi, (rekomendasi) ini hal-hal yang rutin saja," ungkapnya. (bil/agn)